

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menila

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA	33,676,071,693.00	31,961,385,270.00	94.91
Surplus (defisit)	(33,676,071,693.00)	(31,961,385,270.00)	94.91

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA	33,276,942,965.80	31,961,385,270.00	96.05
Surplus (defisit)	(33,276,942,965.80)	(31,961,385,270.00)	96.05

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 31.961.385.270 atau 94.91% dari target sebesar Rp

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retrib

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah	N I H I L			
Pendapatan Daerah					

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah	N I H I L		
Pendapatan Daerah				

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 83.18%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 26.584.600.420 meningkat sebesar 105.05% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.306.995.715,80

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 16,83%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.376.784.850 atau sebesar 94,42% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 5.694.835.000 turun 19,42% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.969.947.250 Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Oerasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	27,981,236,693.00	26,584,600,420.00	95.01	83.18
	Belanja Pegawai	10,577,916,000.00	10,017,808,876.00	94.70	31.34
	Belanja Barang dan Jasa	17,403,320,693.00	16,566,791,544.00	95.19	51.83
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	5,694,835,000.00	5,376,784,850.00	94.42	16.82
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	5,657,835,000.00	5,340,902,850.00	94.40	16.71
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Iri	7,000,000.00	6,052,000.00		
	Belanja Aset Tetap Lainnya	30,000,000.00	29,830,000.00		
	Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja		33,676,071,693.00	31,961,385,270.00	94.91	100.00

0.168227528

#####

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	25,306,995,715.80	26,584,600,420.00	105.05
	Belanja Pegawai	9,262,171,831.00	10,017,808,876.00	108.16
	Belanja Barang dan Jasa	16,044,823,884.80	16,566,791,544.00	103.25
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	7,969,947,250.00	5,376,784,850.00	67.46
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	6,699,947,250.00	5,340,902,850.00	79.72
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	1,270,000,000.00	6,052,000.00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya		29,830,000.00	
	Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumlah Belanja		33,276,942,965.80	31,961,385,270.00	96.05

#####

19.42919

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Program	SHEET 24A			
	Kegiatan				
	Sub Kegiatan				
Jumlah Belanja					

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Program	SHEET 24B		
	Kegiatan			
	Sub Kegiatan			
Jumlah Belanja				

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA	realisasi 2023	realisasi 2022
Rincian Objek	(Rp)	(Rp)
	-	-

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan per Rincian Objek pendapatan, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.1.2 Belanja	realisasi 2023	realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)
	31,961,385,270.00	33,276,942,965.80

3.1.3 Pendapatan - LO	jumlah realisasi	jumlah realisasi
Rincian Objek ...	LO	LO
	-	-

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.4 Beban	JUMLAH BEBAN-LO	JUMLAH BEBAN-LO
Beban	Des 31 Desember 2023	Des 31 Desember 2022
	28.317.224.625,44	25.292.835.936,8

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.5 Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	24.906.892	23.469.920
Aset Tetap	20.031.087.639,63	18.236.335.646,34
Aset Lainnya	4.150.015.168,83	3.617.821.490

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Utang Belanja Telepon	1.746.546	1.539.510

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban selama tahun berjalan.

3.1.7 Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	24.204.263.154,46	21.876.087.546,34

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bab V
Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari target Rp xx yang

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp xx atau xx% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 31.961.385.270 atau 94,91% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 26.584.600.420 atau sebesar 95,01% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 10.577.916.000 terealisasi sebesar Rp 10.017.808.876 atau 94,70% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 17.403.320.693 terealisasi sebesar Rp 16.566.791.544 atau sebesar 95,19% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi Rp xx atau xx% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 5.376.784.850 atau 94,42% dari anggaran. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 24.206.009.700,46 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 24.906.892, Aset Tetap sebesar Rp 20.031.087.639,63 dan Aset Lainnya sebesar Rp 4.150.015.168,83

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 1.746.546, yang merupakan Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 24.204.263.154,46

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp xx yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp xx.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 28.317.224.625,44 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 26.585.899.943.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp 26.585.899.943

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 19.840.576.612,18 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp 28.317.224.625,44

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp 719.525.897,72

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 24.206.009.700,46 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

Kepala SKPD

Ig. Trihastono, S.Sos., M.M
NIP. 196907231996031005